

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMELIHARA ANAK TERLANTAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

YUNI ASTUTI

NPM:1321020139

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H / 2017 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMELIHARA ANAK TERLANTAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

**YUNI ASTUTI
NPM:1321020139**

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M..H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar

Oleh : Yuni Astuti

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak terlantar merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi dimasyarakat karena orangtua yang tidak bertanggung jawab, karena disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lahir di luar nikah yang membuat orangtua sengaja penelantarkan anaknya. Disini lah peran Dinas Sosial menjaga anak-anak tersebut yang berkewajiban memelihara anak tersebut karena anak adalah masa depan bangsa. Dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mempunyai tujuan yaitu pembangunan kesejahteraan sosial dengan terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar. Tujuan yang hendak di capai adalah Mengetahui peran pemerintah terhadap memelihara anak-anak yang terlantar dan Mengetahui upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam menanggulangi anak terlantar di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi metode analisis data yaitu setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti” .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial adalah untuk menjaga dan merawat anak terlantar mencapai kesejahteraan sosial karena itu termasuk tujuan yang ingin dicapai oleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang tidak dilarang hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, manusia dilarang untuk menelantarkan anaknya karena anak adalah amanah yang harus dijaga dan anak merupakan titipan Allah SWT.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Yuni Astuti

NPM : 1321020139

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MEMELIHARA ANAK
TERLANTAR**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 197509302003121002

**Mengetahui
Ketua jurusan Siyasah**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MEMELIHARA ANAK
TERLANTAR** disusun oleh Yuni Astuti, NPM.1321020139,
Program Study : Siyasah, telah diujikan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada
hari/tanggal: Rabu/06 September 2017

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Hendriyadi, SHI., MHI.

Penguji I : Eti Karini, S.H., MHI.

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

DEKAN

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ إِنَّهُ يَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Artinya :

. . .dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. . . QS Al An'am : 151

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis mempersembahkan pada orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Orang tuaku ayahku Arif Gunawan dan ibuku Yusnawati (Alm) yang telah mendidik dan membesarkanku dengan doa dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu
2. Untuk ayukku Dessy Ariyani dan Dina Mariyana, kakaku Agus Yustiawan, dan adikku Eko Sutrisno, beserta keluarga besarku yang telah banyak membantu materil maupun moril serta masukan hingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapainya cita-cita
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Yuni Astuti. Penulis dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 28 Januari 1994, anak ke empat dari 5 bersaudara, diantaranya Dessy Ariyani, Dina Mariyana, AgusYustiawan, EkoSutrisno.

Jenjang pendidikan penulis yaitu :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Sinar Harapan Palembang pada tahun 2000.
2. Sekolah Dasar (SD) di SD N 47 Kota LubukLinggau, Sumatra Selatan lulus pada tahun 2006.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 26 Bandar Lampung lulus pada tahun 2009.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012.
5. Pada tahun 2013 penulis diterima di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jurusan Siyasa sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Mahasiswa;
2. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Eko Hidayat, S.Sos., M..H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah dan Frenki,S.E.I., M.Si. selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;
5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;

6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terima kasih telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat yang selalu mendukung Kiki Derta Sari Rezki dan Sella Anggini Putri;
8. Orang-orang yang telah mendukung Ines Wulandari, Novitasari, Galuh anggraini Tungga Dewi, Evi ardianti, Suwantina;
9. Untuk teman-teman sekelasku di Jurusan Siyasah angkatan 2013 yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya;
10. Teman-teman KULTA (Kuliah Ta'aruf) dan KAK AS (Kakak Asu) terimakasih untuk awal yang baiknya di kampus;
11. Teman-teman KKN 2016 kelompok 91 di Desa Tanjung Krajan, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah;
12. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku;
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa depan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Agustus 2017.
Penulis,

YUNI ASTUTI
NPM. 1321020139

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Islam tentang Perlindungan Anak Terlantar	16
1. Pengertian Anak	16
2. Dasar Hukum Perlindungan anak	17
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam perlindungan	
Anak	26
4. Peran negara dalam Perlindungan Anak Terlantar	29
B. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Peraturan	
Perundang-undangan	31
1. Pengertian Anak dan Anak Terlantar	31
2. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	34
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Perlindungan	

Anak Terlantar	35
4. Peran Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar	39
BAB III PENYAJIAN DATA.....	41
A. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar	
Lampung	41
B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar	
Lampung	46
C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar	
Lampung	47
D. Gambaran Anak Terlantar di kota Bandar	
Lampung	49
E. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam	
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar	51
BAB IV ANALISIS DATA	54
A. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	
dalam Memelihara Anak Terlantar	54
B. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peran	
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara	
Anak Terlantar	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHUUAN

A. Penegasan Judul

Judul ialah merupakan deskriptif atau cerminan dari pokok persoalan yang akan menjadi pembahasan dalam suatu karya ilmiah, dimana dengan adanya judul akan memberikan suatu revalasi antara jalur pemikiran dari awal hingga akhir. Oleh karena itu agar tidak terdapat kekeliruan serta penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca, maka perlu diberikan suatu penegasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah ‘’analisis hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar’’. Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung di dalam judul ini, perlu ditegaskan sebagai berikut :

1. Analisis adalah memperkirakan atau besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya. Kejadian (*event*) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel.¹
2. Hukum Islam adalah menurut Hasby Ash-Shiddiqie, hukum Islam sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang dapat diartikan : ‘’koleksi daya

¹M.Iqbal Hasan, *metode penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghala Indonesia, 2002), h.97.

upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat',²

3. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.³
4. Dinas Sosial adalah daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁴
5. Memelihara adalah kata 'pelihara' merupakan 1) menjaga (membela, merawat, menyelenggarakan, dsb) baik-baik 2) mengusahakan (mengelola, memiara, mendidik) baik-baik 3) memiara atau menernakan (binatang) 4) menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya.⁵
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan sub di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang di maksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial kota Bandar Lampung dalam upaya

²Hasby Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), h.44.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 667.

⁴Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

⁵W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka 2006), h. 860.

⁶Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

pembinaan anak terlantar dan kemudian itu akan ditelaah melalui hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Anak sebagai aset masa depan bangsa dan penerus dari generasi yang tua mempunyai harapan yang besar untuk membangun negara yang maju dan berkembang di masa depan, namun juga mempunyai problem yang harus diperhatikan perkembangannya.
2. Masalah anak terlantar di Kota Bandar Lampung sangat memperhatikan sehingga menarik untuk diadakan penelitian.
3. melakukan studi ilmiah terhadap masalah tersebut untuk mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya banyak nya anak terlantar tersebut.
4. Secara akademis masalah ini ada hubungannya dengan disiplin ilmu Siyash yang penulis perdalam. Disamping itu juga judul masalah ini belum ada yang membahas.

C. Latar Belakang Masalah

Dasar negara Pancasila adalah jiwa, inti sumber dan landasan UUD 1945. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah garis besar cita-cita yang terkandung dalam pancasila. Batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila yang disusun dalam Pasal-pasal.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu nya sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Di mana tentang anak terlantar terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.⁷

Undang-undang 1945, Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3). Dengan adanya jaminan dalam Undang-undang dasar tersebut diatas berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan pondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

⁷<http://www.pustakaindonesia.org/hubungan-pancasila-dengan-pasal-pasal-dalam-uud-1945/> (18 February 2017)

⁸Abdussalama, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : PTIK Jakarta, 2016), h.28

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁹

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 55 (1) pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) untuk penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. (4) dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Penjelasan Pasal 55, Ayat (1) yang dimaksud dengan frasa

⁹ Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta), h.105.

dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan. Pasal 57, dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengadilan anak sebagai anak terlantar. Pasal 58 (1) penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. (2) pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁰

Anak terlantar merupakan salah satu akar masalah kesejahteraan sosial khususnya di Bandar Lampung selain itu juga terdapat berbagai masalah sosial lainnya. Menurut data statistik Dinas Sosial kota Bandar Lampung jumlah anak terlantar pada tahun 2012 berjumlah 305 anak terlantar dan selanjutnya menurun pada tahun 2013 berjumlah 267 anak terlantar dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu berjumlah 1438 anak terlantar.¹¹

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 Pasal 1 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.¹² Dan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

¹⁰*Ibid.*, h. 146.

¹¹Dokumen Dinas sosial Kota Bandar Lampung tahun 2014

¹²Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

tentang penyelenggaraan perlindungan anak, ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi ;

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan resiko;
- c. Penanganan;
- d. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah :¹³

- a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
- b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
- c. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
- e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
- g. Anak Terlantar;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja Dinas Sosial kota Bandar Lampung pasal 3 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. pasal 11 ayat (1)

Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya Al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang disebutkan dalam surat al-An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٥١﴾

Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Tentang anak terlantar dan yatim, Islam mengajurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah ayat 220 :

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٢٢٠﴾

Artinya :

220. tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dipandang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul analisis hukum Islam terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap peran Dinas sosial kota Bandar Lampung dalam memelihara anak terlantar ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran pemerintah terhadap memelihara anak-anak yang terlantar.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam menanggulangi anak terlantar di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penyajian skripsi ini menjadi bahan pemikiran yang positif kepada semua pihak, terutama bagi penulis dalam penganggulangan anak terlantar.

2. Sebagai syarat Akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah : “cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.”¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud dengan metode dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 15.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁶ Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁷ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah ‘suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai

¹⁶*Ibid.*, h. 32.

¹⁷ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 119.

¹⁸ Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5.

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”¹⁹.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :²⁰

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan para pegawai Dinas Sosial Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

¹⁹ Kaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²⁰ Abdurkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu :

a. Metode interview

Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.²¹ sedangkan menurut Mardalis, Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²²

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia

²¹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 165.

²²Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*Cet. Ke-7(Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 64.

(pengeliatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.²⁴

Ada tiga jenis pokok dalam observasi yaitu : observasi partisipan dan observasi non partisipan, observasi sistematis dan observasi non sistematis, dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.²⁵ Ada pun jenis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (*disebut observes*).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang terbentuk tulisan,²⁶ atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya”,²⁷ yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

²³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

²⁵ *Ibid*, h. 55.

²⁶ Koenjorodiningrat, *Op.Cit.*, h.46.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 23.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti” . Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.²⁸

Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu : “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 42.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam tentang Perlindungan Anak Terlantar

1. Pengertian anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orangtua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.²⁹ Berkaitan dengan eksistensi anak, Al-Qur'an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya :

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Anak selain perhiasan atau kesenangan bahwa anak juga sebagai penentram dan penyejuk hati, Allah SWT berfirman QS Al-Furqon ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

²⁹<http://tarbiyahtulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-Islam/amp/>

Artinya :

dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Fuqron : 74)

2. Dasar hukum perlindungan anak

Perhatian Islam terhadap anak-anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu merayakan dan menaruh perhatian pada anak-anak tidak hanya setelah dilahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang difirman Allah QS Al-Baqarah ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya :

tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak-anak.³⁰

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain :³¹

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

Bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

QS Al-Na'am : 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ ۖ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

³⁰ Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam tentang Perawatan Islam (Bandung : al-Bayan, 1985), h. 15.

³¹ <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120> (19 April 2017)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-

anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS At-Tahrim ; 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu : pertama, nafkah ushul yaitu bapak, kakek, terus keatas, kedua,

nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri.

Adapun yang menjadi dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, ‘‘satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu

dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sadaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan member nafkah keluargamu.” (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985:213)

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS At-Tahrim : 6 mengingatkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, Khalifah kedua dalam rangkaian Al-Khulafaurrasyidin, pernah mengatakan “termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orang tua, adalah mengajarkan menulis, memanah, dan tidak member rizqi kecuali yang halal baik.”

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujarat: 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ :

Artinya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di sisi lain Allah telah mengintruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah 8 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan,. Antara anak sulung dengan yang lain, dst.

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinya kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkandan merasakan wujud nyata dari perasaan cintakasih orangtuanya.

7. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamiahnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anakpunya hak untuk bermain sesuaidengan tingkat perkembangan usiannya. Yang penting buat orangtua adalah

bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin salat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau, setelah selesai salat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: ‘’kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainan, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Masa kanak-kanak dalam Islam dilukiskan sebagai dunia yang indah yang terdiri atas kebahagiaan, khayal, cinta Allah terhadap anak-anak yang dikatakan dengan sumpah.

Merawat anak adalah suatu kewajiban dan mencintai mereka mendekatkan seorang kepada Allah.³² Terbuktilah bahwa perhatian Allah terhadap anak-anak, membuat-Nya mencabut hukuman dari hamba-hambanya.

³² Ibid., h. 16.

Kecintaan Rasulullah SAW kepada anak-anak memenuhi hatinya yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa kisah dibawah ini.³³ Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di mimbar dan memberikan khutbah jumat. Al-Hasan dan Al-Husin datang, berlari dan tersandung. Seketika itu nabi berhenti dari khutbahnya dan turun dari mimbar untuk menghampiri cucu-cucunya, menggendongnya dengan lemah lembut dan kemudian naik ke mimbar lagi, seraya berkata : “kekayaan dan anak-anak membuat kita tergila-gila. Aku melihat anak-anakku berlari dan tersandung, maka aku tak dapat menahan diri untuk turun dan menggendong mereka.” (Hadis Syarif)

Pada suatu hari, Rasulullah sedang salat dan datanglah Al-Hasan dan Al-Husin. Mereka memanjat ke punggungnya ketika beliau sedang melakukan ruku’. Beliau terus saja dalam keadaan ruku dan tidak mau mengusir mereka hingga kedua anak itu turun sendiri. Ketika beliau telah mengucapkan salam dan selesai melakukan salat, para sahabat bertanya mengapa beliau ruku begiti lama. Beliau menjawab: “kedua anakku menaiki punggungku dan aku tak ingin mengusir mereka.”

3. Pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan anak

1. Tanggung jawab orang tua

Yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah yang pertama yaitu tanggung jawab keluarga karena dalam pandangan

³³ Ibid., h. 17.

Islam keluarga merupakan madrasah bagi anak-anak. Keluargalah yang memiliki andil besar dalam mengenalkan dan menanamkan prinsip-prinsip keimanan. Keluarga pula yang punya kesempatan besar membentuk aqliyah dan nafsiyah yang Islami. Keluarga merupakan cermin keteladanan bagi generasi baru oleh karena itu, perhatian keluarga terhadap pendidikan generasi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk generasi berkualitas.

Secara umum tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak generasi anak adalah ialah menanamkan keimanan yang kokoh sebagai dasar anak untuk menjalani aktivitas hidupnya. Hal ini seperti dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ
لُظْلُمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

2. Tanggung jawab masyarakat

Pendidikan generasi adalah aktivitas sepanjang hayat. Setiap muslim menyadari bahwa aktivitas mencari ilmu dalam Islam tidak saja semasa di sekolah, tetapi dari dalam kandungan hingga masuk liang kubur. Oleh karena itu, gambaran pendidikan generasi dalam masyarakat Islam tak hanya terbatas pada pendidikan generasi formal

(sekolah) tapi pendidikan nonformal di tengah masyarakat juga marak. Hal itu bisa terwujud bila masyarakat menyadari bahwa aktivitas menurut ilmu dan mengajarkan ilmu merupakan sesuatu yang wajib dalam Islam.

Pengadaan kajian-kajian Islam maupun ilmu pengetahuan umum serta fasilitas dan sarana penunjangannya tidak saja dibuat oleh negara tetapi juga oleh masyarakat dengan berorientasi bisnis seperti sekarang.

Ada beberapa bentuk peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan generasi diantaranya, pertama masyarakat berperan mengontrol penyelenggaraan pendidikan oleh negara. Dengan kontrol yang kuat dari masyarakat maka penyelenggaraan pendidikan dapat diterapkan secara sempurna dan menutup celah-celah penyimpangan yang mungkin terjadi. Untuk dapat melakukan control dengan baik masyarakat harus mengetahui secara gamblang apa saja yang menjadi haknya. Kedua, masyarakat diperbolehkan mendirikan sekolah-sekolah swasta tapi kurikulumnya harus sama dengan yang diterapkan negara.

Jadi masyarakat memiliki kewajiban untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pendidikan generasi oleh negara maupun swasta. Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan generasi oleh negara dari tujuan dan metode pendidikan Islam, masyarakat yang menjadi pengawas utama mengoreksi dan meluruskan penyimpangan

itu. Demikian pula bila terjadi aktivitas pendidikan generasi di tengah masyarakat yang bertentangan dengan Islam maka masyarakat wajib melaporkan kepada negara dan menuntut agar negara menjatuhkan sanksi.

4. Peran negara dalam perlindungan anak terlantar

pemerintah memegang peranan penting dalam penganggulan anak terlantar dan sudah tercantum pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak hanya di Undang-Undang Perlindungan anak sudah dijelaskan dalam Firman Allah dalam QS Al An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Islam pun mewajibkan menjaga anak dan melarang membunuh anak, bukan hanya negara yang menjaga anak bangsa nya tetapi peran keluarga dan masyarakat pun juga berperan penting dalam memelihara anak. Negara sudah menetapkan Undang-undang hak dan menjaga anak dan harus dilaksanakan pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat.

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Didalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.³⁴

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam jadi kewajiban orangtua adalah menyayangi dan hak nya adalah memperoleh penghormatan. Artinya seorang diwajibkan menghormati

³⁴Eny Kusdarini, M. Hum: *Perlindungan Anak di Indonesia sebagai perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Civics Volume 2, nomor 1. Juli 2005

jika memperoleh kasih sayang dan orangtua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan.

B. Perlindungan Anak Terlantar menurut Peraturan Perundang-undang di Indonesia

1. Pengertian anak dan anak terlantar

a. Pengertian anak

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat jumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa.³⁵

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Semua anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab. Maka ia perlu

³⁵Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja* (Bandung : Amirco, 1983), h. 33.

mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut W.J.S Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.³⁶

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.³⁷

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan umur 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan Negara Barat Lainnya.

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 tahun, antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa perahlian antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka

³⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta : Perssindo, 2016), h. 35.

³⁷ Ibid, h. 36.

bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.³⁸

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

Romli atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁹

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.

b. Pengertian anak terlantar

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-18 tahun yang bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orangtua, tetapi juga karena beberapa kemungkinan seperti orangtua yang miskin atau tidak mampu, salah satu dari kedua

³⁸ Ibid, h. 36.

³⁹ Op., cit h. 25.

orangtuanya sakit, orang tua atau wali yang mengasuhnya meninggal, keluarga tidak harmonis sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani maupun rohani maupun sosialnya.⁴⁰

Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, Atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.⁴¹

2. Hak anak menurut peraturan Perundang-undang

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Penyelenggaraan perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴² Pasal 52 ayat (1), setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 ayat (2), hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

⁴⁰ Undang-undang No.35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, Ayat 1 dan 6.

⁴¹ <http://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>

⁴² Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 53 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 53 ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 57 ayat (1) setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 ayat (2) setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

Pasal 58 ayat (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Pasal 58 ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dilakukan pemberatan hukum.

3. Pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak terlantar

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, hal ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 20, negara, pemerintah, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga,

dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴³

Pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu :⁴⁴

1. Tanggung jawab pemerintah dan negara

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan negara dimuat dalam Undang-undang tentang perlindungan anak pada pasal 21 ayat (1) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

⁴³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), h. 15.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Pasal 22, negara, pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediannya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 ayat (1) negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pasal 23 ayat (2) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24, Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2. Tanggung jawab orang tua dan keluarga

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dimuat dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak pasal 26 ayat (1), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3. Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat dimuat dalam pasal 25 ayat (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 ayat (2), kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya dengan cara sesuai kemampuannya.

4. Peran negara dalam perlindungan anak terlantar

Memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁴⁵ Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam pasal 34 ayat 1 tersebut terdapat makna dipelihara oleh negara berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, fungsi negara republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Fungsi negara untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan HAM tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 A yang berbunyi “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta

⁴⁵Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat 1

menjamin mereka untuk berkembang dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-hak nya diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya negara, melainkan juga orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 tentang perlindungan anak yang berbunyi ‘hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan persyarakatan yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang efektif. Oleh karena itu selai dibentuk nya lembaga indenpenden, KPAI atas prakarsa-prakasa departemen sosial RI, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan pemerintah, media massa dan kalangan profesi serta dukungan UNICEF.⁴⁶

⁴⁶<http://lindungikami.org/tentangkami/komisi-nasional-perlindungan-anak/>, 3 Agustus

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Berdiri nya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Sejarah berdirinya dinas sosial Bandar Lampung tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Kota Bandar Lampung. Kotamadya Bandar Lampung selain Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan Ibu Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum menjadi Provinsi lampung, Lampung merupakan suatu Keresidenan, sebagai tindak lanjut statusnya di zaman Hindia Belanda dahulu dengan sebutan *Residentie der Lapongohe Districten*, sewaktu zaman Hindia Belanda dahulu Keresidenan Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.⁴⁷

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah *onder afdeling*, Telok-Betong yang dibentuk dengan *Staatsbalat* 1912 Nomor: 462, terdiri dari Ibu Kota Telok-Betong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912 Ibu Kota Telok-Betong ini meliputi juga Karesidenan Lampung, kedua kota tersebut tidak termasuk dalam marga verbal, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang tunduk kepada *Hoof Van Plaastseyk* yaitu kepala *Onder afdeling* Telokbetong. Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut *Plaastleyk Fonds*.

⁴⁷Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

Pengelolaan keuangan diatur dalam Keputusan Residen Lampung tanggal 24 November 1930 Nomor 169.⁴⁸

Sejak kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota TanjungKarang dan Kota Telokbetung berstatus Kota kecil yang merupakan bagian dari kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah *Onder Afdeling* Telokbetong-TanjungKarang berdasarkan Undang-undang Darurat No 5 Tahun 1956, kemudian berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang-Telokbetung dirubah menjadi Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang di dalamnya terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung, sisa wilayah *Onder Afdeling* Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung selatan.

Setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung. Perbatasan Kotamadya TanjungKarang-Telukbetung ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 di dalamnya terdapat 4 Kecamatan, yaitu:⁴⁹

1. Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Bukit Tinggi Bambu Kuning (Kampung Kaliawi)

⁴⁸ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

⁴⁹ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

2. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Sawah Lama.
3. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di sumur Batu.
4. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Mentawai Telukbetung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Juni 1982, yaitu sejak deseraikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diperluas dengan dimasukkannya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung selatan yang meliputi 14 desa dari sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, 14 Desa Kecamatan Panjang.⁵⁰

Kemudian berdasarkan peraturan itu juga kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ditata kembali menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Selanjutnya berdasarkan surat Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B111/HK/1988 Tanggal 6 Juni 1988 serta surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota

⁵⁰ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dengan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan, yaitu : Kedaton, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Sukarame, Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Panjang, Kemiling, Rajabasa, Tanjung Seneng, dan sukabumi.⁵¹

Kotamadya Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) sebagai Ibukota Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor 5 Tahun 1983, tanggal 26 Januari 1983 telah ditetapkan Hari jadinya pada tanggal 17 Juni 1982. Dan sejak itu muncullah Dinas-dinas yang menjadi struktur pemerintahan Kotamadya Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung), termasuk Dinas Sosial Provinsi Lampung.⁵²

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung letaknya cukup strategis yang berada di jalan Panglima Polim No.1 Gedung Air, Bandar Lampung. Bersebelahan dengan jalan Smaratulagi dan letak kantor mudah dijangkau dengan kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk berdasarkan peraturan Nomor 24 Tahun 1996 yaitu tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya

⁵¹ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

⁵² *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Negeri Dinas Daerah Kota Bandar Lampung adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No.15 Tahun 2001 yang sudah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2000.⁵³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya untuk operasional pelaksanaan perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung.⁵⁴

Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung Kemudian mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota

⁵³ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

⁵⁴ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menetapkan visi yaitu “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial bagi masyarakat”. Penjelasan makna visi yaitu penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang ditetapkan oleh Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah :⁵⁵

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan jaminan sosial, serta kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dan keagamaan.
4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu pembangunan kesejahteraan sosial dengan terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan

⁵⁵ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermatabat.⁵⁶

1. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
2. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.
3. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

C. Struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tuganya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan ke mana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka.⁵⁷

Adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini

⁵⁶ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

⁵⁷ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

dapat diketahui melalui struktur yang ada diorganisasi. Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja Dinas Sosial kota Bandar Lampung pasal 5 susunan organisasi :⁵⁸

1. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Secretariat :
 1. Sub bagian program dan informasi;
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 3. Sub bagian keuangan dan aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan sosial :
 1. Seksi pemberdayaan dan kelembagaan;
 2. Seksi pendayagunaan sumber dana sosial;
 3. Seksi kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial :
 1. Seksi pelayanan sosial anak dan rehabilitas penyandang cacat;
 2. Seksi pelayanan rehabilitas tuna sosial;
 3. Seksi fasilitas dan rehabilitas korban narkoba.
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial :
 1. Seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial;

⁵⁸ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 22 Mei 2017.

2. Seksi penanggulangan korban tindak kekerasan;
 3. Seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial.
- f. Bidang Kesejahteraan sosial :
1. Seksi permakamah;
 2. Seksi data informasi;
 3. Seksi keagamaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

D. Gambaran Anak Terlantar di Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung dan terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi Lampung merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatra dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar Kota Bandar Lampung yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan tingkat

kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁵⁹

Kemiskinan merupakan salah satu pemicu munculnya masalah sosial salah satunya yaitu anak terlantar di kota Bandar Lampung memang salah satu fenomena yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Karena faktor kemiskinan banyak orang tua yang membiarkan anaknya terlantar karena tidak cukupnya perekonomian sehingga anak pun menjadi korban dari perekonomian keluarga.

Selain disebabkan kemiskinan terjadinya anak terlantar karena pendidikan karena di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan, rendahnya kemauan untuk belajar kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu yang perlu dicemaskan. Kurangnya pendidikan membuat orang kurang paham akan upaya pentingnya pengetahuan terutama tentang sosial mendapatkan pendidikan yang baik akan membuat orang paham akan pentingnya peran sosial sehingga membuat paham bahwa anak adalah sesuatu yang harus dijaga.⁶⁰

⁵⁹ Muzarin, wawancara dengan Kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 22 Mei 2017.

⁶⁰ Muzarin, wawancara dengan Kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 22 Mei 2017.

Masalah lain yang terjadi karena anak yang lahir di luar nikah yang anaknya memang tidak diinginkan dan menelantarkan anak secara sengaja, seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah. Pada tingkat yang ekstrempelaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidakmampuan orangtua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.⁶¹

E. Upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar

Upaya Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam Pemenuhan hak anak terlantar terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu :⁶²

1. Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 3 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

2. Penyelenggaraan Perlindungan anak

pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

a. Pencegahan;

⁶¹ Muzarin, wawancara dengan Kepala Reabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, 22 Mei 2017.

⁶² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- b. Pengurangan resiko;
- c. Penanganan;
- d. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

sasaran pencegahan adalah menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak meliputi antara lain merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme, meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi.

kebijakan, program, dan mekanisme meliputi antara lain Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data.

Pengurangan resiko meliputi antara lain Mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga, Memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan, Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar Penanganan

penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak penelantaran meliputi antara lain Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan, Tindakan penyelamatan, Penempatan anak di rumah perlindungan sementara, Rehabilitas, Pemulangan dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitas.

penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa keselamatan anak terancam, anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali, anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/ pengasuh/wali dan atau masyarakat, anak dalam kondisi/situasi korban pencabulan/hamil.

Namun dalam menjalankan upaya nya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa hambatan seperti fasilitas-fasilitas yang tidak mendukung untuk mengadakan upaya tersebut selain itu kurangnya dana pun menjadi hambatan untuk melaksanakan tugasnya.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar

Peran Dinas Sosial terhadap anak-anak terlantar sangatlah penting karena memang Dinas sosial yang bertugas penanganan masalah sosial salah satunya masalah anak terlantar yang saya bahas saat ini, karena jika ada permasalahan sosial seperti anak terlantar biasa nya akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberi rehabilitas atau penanganan lebih lanjut.

Peran Dinas Sosial terhadap penanganan anak terlantar melingkupi Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak seperti pencegahan yaitu menciptakan kondisi yang dapat terjadinya penelantaran anak pencegahannya seperti meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi.

Sosialisasi tersebut memberi pengetahuan kepada masyarakat dan keluarga mengenai perlindungan anak, mengasuhan anak, dampak buruk penelantaran anak. Lalu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu pengurangan resiko yang akan terjadi dimasyarakat yaitu Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga, Memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan

ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan, Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak, Melibatkan organisasi anak dan forum anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan penelantaran anak, Melibatkan organisasi masyarakat/pemuda ditingkat kelurahan (karang taruna). Kemudian upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan penanganan yaitu yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar yaitu pertama Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan, kedua tindakan penyelamatan, ketiga Penempatan anak di rumah perlindungan sementara, biasa nya anak terlantar memang sengaja diterlantarkan orangtua nya maka anak tersebut diasuh oleh rumah perlindungan atau panti yang diolah oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berusaha melakukan upaya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan anak terlantar dan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak berhak mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, mendapatkan wali bagi anak yang ditinggalkan orang tua nya yang meninggal atau ditelantarkan orangtuanya, berhak mendapatkan perlindungan dari penelantaran orangtua, disini peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat berperan penting bagi anak terlantar karena disini Dinas sosial berusaha untuk

memenuhi hak-hak anak terlantar agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya karena anak adalah masa depan bangsa.

Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada prinsipnya telah berjalan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun masih belum maksimal disebabkan kurangnya fasilitas untuk menjalankan upayanya serta kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi faktor kenaikan jumlah anak terlantar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar

Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar

Islam merupakan agama yang universal yang telah disempurnakan, Islam telah memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani, material – spiritual, individu – sosial, dan duniawi – akhirat. Kiranya tidak salah jika Islam merupakan agama yang sistem hidup yang menyeluruh yang mencakup aspek aqidah, akhlak, bahkan masyarakat. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* berbicara kepada hati nurani mengenai perintah dan larangan. Misalnya dalam masalah yang berkaitan dengan rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar, agama tidak membicarakannya dari sudut Undang-undang semata, tetapi juga mengetuk kepekaan hati seseorang. Kepedulian Islam terhadap kecil meliputi seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga Islam menganjurkan untuk memperhatikan nasib anak-anak yatim/ anak-anak terlantar.

Islam bukan hanya menjaga Undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani. Artinya, pengentasan terhadap nasib mereka bukan semata diserahkan kepada Undang-undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan yang tulus dan keterlibatan langsung pemerintah dan masyarakat dalam membenahi kehidupan anak terlantar merupakan kejasama yang diharuskan untuk saling menunjang antara lainnya.

Hak anak yang telah diatur dalam Islam bukan hanya sejak anak dilahirkan bahkan sejak anak tersebut dalam kandungan, telah menetapkan hak-hak anak tersebut yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk bermain.

Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang melakukan upaya terhadap menangani masalah anak terlantar dengan berbagai upaya seperti yang di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pencegahan yaitu menciptakan kondisi yang dapat terjadinya penelantaran anak pencegahannya seperti meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi. Lalu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu pengurangan resiko yang akan terjadi dimasyarakat yaitu Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan,

konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga, Memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan, Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak, Kemudian upaya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan penanganan yaitu yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar yaitu pertama Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan, kedua tindakan penyelamatan, ketiga Penempatan anak di rumah perlindungan sementara, biasanya anak terlantar memang sengaja diterlantarkan orangtuanya maka anak tersebut diasuh oleh rumah perlindungan atau panti yang diolah oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sesuai apa yang diamanahkan oleh agama Islam menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar. Seperti yang dikatakan hadis Pada suatu hari, Rasulullah sedang salat dan datanglah Al-Hasan dan Al-Husin. Mereka memanjat ke punggungnya ketika beliau sedang melakukan ruku'. Beliau terus saja dalam keadaan ruku dan tidak mau mengusir mereka hingga kedua anak itu turun sendiri. Ketika beliau telah mengucapkan salam dan selesai melakukan salat, para sahabat bertanya mengapa beliau ruku begiti lama. Beliau menjawab: 'kedua anakku menaiki punggungku dan aku tak ingin mengusir mereka''. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjaga anak untuk berperilaku lembut dan memberi kasih sayang kepada anak bagaimana orangtua tega menelantarkan

anaknya apapun alasannya bukannya anak itu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT yang sangat berharga dan harus dijaga karena anak itu titipan Allah SWT.

Dalam masalah anak yang mengalami penelantaran anak karena orangtuanya tidak bertanggung jawab anak tersebut tetap mendapatkan haknya melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung lalu kemudian ditempatkan tinggal di panti asuhan yang telah kerjasama bersama Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, di sini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak anak yang mengalami penelantaran baik hak menurut agama maupun Undang-undang karena anak adalah penurus masa depan yang harus dijaga dan dirawat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu:

1. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui beberapa upaya penyelenggaraan, yaitu pertama, pencegahan dengan meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi. Kedua, pengurangan resiko melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga. Ketiga, penanganan yaitu yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak terlantar yaitu Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan, kemudian tindakan penyelamatan, dan Penempatan anak di rumah perlindungan sementara.
2. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang tidak dilarang dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, manusia dilarang untuk menelantarkan anaknya karena anak adalah amanah yang harus dijaga dan anak merupakan titipan Allah SWT karenanya anak harus dijaga demi

keberlangsungan hidup manusia dan umat Nabi Muhammad SAW, dan negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak terlantar terutama anak-anak yang sudah tidak mempunyai orangtua.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Dinas Kota Bandar Lampung agar penerapan penyelenggaraan perlindungan anak khususnya anak terlantar dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga upaya pembinaan yang dijalankan lebih dimaksimalkan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
2. Bagi aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak para pelaku penelantaran anak agar berkurangnya jumlah anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. IAIN Raden Intan. Bandar Lampung, 2015.
- M. Iqbal Hasan. *metode penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghala Indonesia, 2002).
- Hasby Ash-Shiddiqis. *Filsafat Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka 2006.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal* Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- <http://www.pustakaindonesia.org/hubungan-pancasila-dengan-pasal-pasal-dalam-uu-1945/> (18 February 2017).
- Abdussalama. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK Jakarta, 2016.
- Mohammad Taufik Makaro. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Kaelan, M.s, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Abdurkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

S. Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 2004.

Mardalis. Metode Penelitian suatu pendekatan proposal Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rianto Andi. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

Cholid Narbukodan Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. Metodologi Riset. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja. Bandung : Amirco, 1983.

Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta : Persindo, 2016.

Undang-undang No.35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewan Ulama Al-Azhar. Ajaran Islam tentang Perawatan Islam. Bandung : al Bayan, 1985.

<http://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>